



IMPLEMENTASI PEMBENTUKAN KOMPONEN CADANGAN SEBAGAI PERWUJUDAN KESADARAN BELA NEGARA

Deni D.A.R, Argen Buana Candra Altaran, Martinus DAW

¹Universitas Pertahanan Republik Indonesia,
denidadang@gmail.com,
altaranargen@gmail.com, martinus@unhan.ac.id

Abstract. Formation of the Reserve Component has various problems, including the lack of strong availability of regulations, the lack of synergistic cooperation between Ministries in implementing the National Defense program and the need to increase the effectiveness of the formation of the Reserve Component. Therefore, the aim of this research is to find appropriate strategies and efforts to overcome various problems in the formation of Reserve Components. The research method used. in this thesis uses a qualitative method with a descriptive-qualitative research design through direct research and reinforced by literature study. The results and discussion of this thesis research show that the current implementation of Reserve Component Formation is still not effective in terms of quality and quantity according to the targets set by the Government, in this case the Ministry of Defense, where currently the annual target from 2021-2024 which has been set can only be achieved by 10% from the set target. The lack of outreach to the community, polemics among the community due to regulations that are not yet comprehensive and connectivity between ministries/institutions that organize the National Defense program are the core problems in influencing the success of achieving these targets. The conclusion from the results of this research is the importance of strategies and efforts in increasing the effectiveness of the formation of Reserve Components through effective coordination between agencies through the formation of integrated SOPs, as well as the formation of special institutions for Reserve Components.

Keywords: Implementation, Regulation, Integration and Effectiveness

Abstrak. Pembentukan Komponen Cadangan memiliki berbagai permasalahan diantaranya belum kuatnya ketersediaan regulasi, belum terjalannya kerjasama yang sinergis antar Kementerian dalam pelaksanaan program Bela Negara serta kebutuhan peningkatan efektivitas pembentukan Komponen Cadangan. Maka daripada itu, tujuan penelitian ini adalah menemukan strategi dan upaya yang tepat dalam mengatasi berbagai permasalahan pada pembentukan Komponen Cadangan. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian deskriptif-kualitatif melalui penelitian langsung dan diperkuat studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan penelitian kajian ini menunjukkan bahwa implementasi Pembentukan Komponen Cadangan saat ini masih belum efektif dalam segi kualitas maupun kuantitas sesuai target yang dicanangkan oleh Pemerintah dalam hal ini kementerian pertahanan, dimana saat ini target pertahun dari 2021-2024 yang dicanangkan hanya mampu dicapai 10% dari target yang ditetapkan. Minimnya sosialisasi terhadap masyarakat, polemik ditengah masyarakat akibat regulasi yang belum komprehensif serta konektivitas antar kementerian/lembaga yang menyelenggarakan program Bela Negara sebagai persoalan inti dalam mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pentingnya strategi dan upaya dalam meningkatkan efektivitas pembentukan Komponen Cadangan melalui koordinasi efektif antar instansi melalui pembentukan SOP terpadu, serta pembentukan kelembagaan khusus Komponen Cadangan.

Kata kunci: Implementasi, Regulasi, Integrasi dan Efektivitas



1. LATAR BELAKANG

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Komponen cadangan terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (Undang-undang PSDN), pada Pasal (5) menyatakan bahwa “PSDN untuk kepentingan Pertahanan Negara salah satunya dilaksanakan melalui pembentukan komponen cadangan. Kemudian pada Pasal (29) komponen cadangan disiapkan untuk dikerahkan melalui Mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama dalam menghadapi ancaman militer dan ancaman hibrida”. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah khususnya kementerian Pertahanan dalam membentuk kekuatan komponen cadangan guna meningkatkan kemampuan Komponen Utama (TNI) dalam sistem pertahanan negara. Mengutip pepatah bangsa Yunani yang dijadikan landasan pembangunan kekuatan pertahanan di berbagai Dunia “*Si vis pacem para bellum*” (bila mau berdamai maka bersiaplah untuk berperang). Sebuah peribahasa Latin yang konon dikutip dari penulis militer Romawi, Publius Flavius Vegetius Renatus: *Igitur qui desiderat pacem, praeparet bellum*. Dapat dipahami sebagai peribahasa yang mengingatkan bahwa negara kita tidak boleh berandai-andai, mengharap ataupun membuat suatu prediksi bahwa sepuluh sampai dengan dua puluh tahun kedepan tidak ada satu negarapun yang akan melakukan agresi ke negara kita, adalah suatu pernyataan konyol, mengingat bahwa perkembangan situasi global sangat pesat dan tidak menentu “*The development of the global situation is uncertain*” (Rusfiana, 2021).

Pembentukan Komcad, pada tahun 2021-2023 Kementerian Pertahanan RI telah merekrut sebanyak 8.574 personel Komcad. Hal tersebut akan terus meningkatkan sebagai daya tangkal terhadap setiap potensi ancaman. Namun dalam penyelenggaraannya masih terdapat beberapa perhatian yang menyatakan bahwa pembentukan Komcad sarat akan pelanggaran HAM. Salah satu masalah dalam UU No. 23/2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara sebagai induk dari pembentukan Komponen Cadangan terkait norma sanksi pidana empat tahun bagi anggota Komcad yang tidak memenuhi panggilan mobilisasi. Ancaman itu dianggap menyalahi prinsip *conscientious objection* (hak untuk menolak atas dasar keyakinan) dalam pelibatan warga sipil untuk pertahanan yang diakui dalam norma HAM internasional (Iwan Setiawan, 2023). Kemudian UU PSDN menimbulkan peluang pengaturan komponen cadangan (Komcad) yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal seperti yang terjadi pada masa pemerintahan orde baru. Bentuk ancaman yang diatur sangat luas dan tanpa batas, sehingga rawan untuk ditafsirkan sesuai kepentingan kelompok tertentu. substansi UU PSDN antara lain komcad berasal dari sumber daya alam dan sumber daya buatan yang tidak melalui proses demokratis karena melanggar prinsip kesukarelaan, padahal jelas hak atas properti telah dijamin konstitusi (Ady Thea, 2023).



Kondisi yang diharapkan dalam pembentukan Komcad adalah terbentuknya sistem pertahanan semesta termasuk Komcad yang sangat penting untuk menjaga keamanan negara dan kesiapsiagaan dalam menghadapi setiap serangan. Komcad terdiri dari personel, peralatan, dan persediaan yang diperlukan untuk menangani krisis dan pertempuran. Dalam mempertahankan negara personel militer dan sipil yang terlatih dan dipersiapkan menghadapi situasi pertempuran, selain personel, peralatan memainkan peran penting. Senjata, kendaraan, peralatan medis, dan perangkat komunikasi semuanya adalah peralatan yang diperlukan. Untuk memastikan bahwa semua peralatan ini tersedia untuk digunakan saat dibutuhkan, maka harus disimpan dan dipelihara dengan baik secara teratur. Selain itu, Komcad dapat membantu negara dalam menanggapi keadaan darurat yang tidak terduga seperti wabah penyakit atau bencana alam, membantu upaya evakuasi dan pemulihan, serta dukungan logistik dan medis (Dewi & Dananjaya, 2023). Pembentukan Komcad memperhatikan beberapa aspek perekrutan dalam menjaring individu yang berkualitas dan berkualifikasi, kemudian penempatan organisasi jelas setelah pelaksanaan pembentukan Komcad dan Integrasi secara tetap dengan Komponen Utama.

Berdasarkan beberapa fenomena yang terjadi dalam penyelenggaraan pembentukan Komcad oleh Kementerian Pertahanan, maka peneliti merangkum adanya beberapa gap antara *das sein* (kondisi saat ini) dan *das sollen* (kondisi yang diharapkan) dalam beberapa persoalan berikut: **Pertama**, belum kuatnya regulasi dalam pelaksanaan program Pembinaan Bela Negara dalam hal ini Komcad. Hal ini diindikasikan masih terdapat pasal-pasal dalam UU PSDN yang mengandung problematik, di sisi lain pelaksanaan kebijakan UU PSDN masih mengandung kelemahan-kelemahan yang berpotensi menimbulkan konflik horizontal. **Kedua**, belum terjalannya kerjasama yang sinergis antar Kementerian/Lembaga (K/L) atau non-Kementerian dalam penyelenggaraan program Bela Negara, hal tersebut menimbulkan interpretasi kurang baik bahwa program Bela Negara dilaksanakan sesuai kebutuhan Kementerian Penyelenggara semata (primordial). Padahal dalam kepentingan bela negara adalah hak dan kewajiban seluruh warga negara. Perlu adanya penelitian yang mendalam sehingga pelaksanaan program Bela Negara dapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **Ketiga**, perlu adanya strategi dan upaya dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Bela Negara. Sebagai komparasi dengan Negara-negara maju bahwa program Bela Negara seperti ini telah dilaksanakan dalam bentuk program wajib militer dan memiliki dampak yang signifikan bagi kekuatan dan kemampuan pertahanan negara sebagai contoh Amerika Serikat, Rusia, China dan Singapura.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Dari sudut pandang filosofis, bela negara menjadi suatu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional, dimana kecerdasan yang dimaksud adalah memiliki arti yang luas tidak hanya terpaku pada kecerdasan berfikir, namun juga dapat mencakup kecerdasan emosi serta kecerdasan spiritual, dapat diaplikasikan dalam konteks kehidupan sosial, nasional, dan negara yang berlandaskan Pancasila. Evaluasi terencana dan sistematis terhadap implementasi bela negara sangat diperlukan untuk mencapai tujuan nasional yang diharapkan.

Pembentukan komponen cadangan di Indonesia adalah suatu kewajiban hukum dan merupakan salah satu upaya dalam membangun kekuatan untuk mempertahankan negara, terutama dalam mengatasi AGHT pada bidang non-militer. Faktanya bahwa dalam



membangun kekuatan guna menghadapi tantangan era globalisasi yang datang dari lingkungan strategis saat ini biasanya bersumber dari dalam negeri yang tidak berwujud, sehingga dalam menghadapi tantangan khas ini, peran serta masyarakat mutlak diperlukan dan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan TNI dan Polri.

Pembangunan komponen cadangan yang dilaksanakan di TNI AD, dapat meningkatkan kekuatan pertahanan matra darat dihadapkan pada perkuatan pertempuran. Setelah dibentuk, kader Komcad yang telah terlatih kemudian ditempatkan kembali ditengah masyarakat diseluruh daerah dapat berfungsi sebagai pengumpul informasi yang mendukung pelaksanaan tugas TNI dan berperan dalam kegiatan pengamatan serta pengawasan. Kader Komcad dapat kembali diaktifkan setelah adanya keputusan mobilisasi yang dikeluarkan oleh Presiden dalam menghadapi masa krisis tentunya melalui persetujuan DPR RI.

Peran Komcad yang tercantum dalam amanat UU Hanneg ditujukan dalam mengatasi ancaman bersenjata dari negara lain, sedangkan amanat dalam UU PSDN bahwa kader Komcad berperan sebagai warga negara sipil dengan dilengkapi serangkaian keterampilan pertempuran dengan menjadi kekuatan pendukung dalam menebalkan kekuatan pokok TNI. Mengenai fungsi yang diemban oleh kader Komcad pada upaya meningkatkan kemampuan pertahanan, perlu dilakukan peninjauan ulang pada pelaksanaan metode pelatihan Komcad, dimana saat ini lebih dominan pada keterampilan militeristik, namun dihadapkan pada kondisi ancaman yang tidak hanya datang dari angkatan bersenjata negara lain, selayaknya pembekalan ditambah dengan keterampilan pada aspek-aspek lainnya sehingga dapat berdaya guna dalam mengatasi ancaman sesuai eskalasi yang terjadi.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala dalam kehidupan sosial manusia. Menurut Sugiyono (2020) “penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi”. Menurut John W. Creswell (2010) “penelitian kualitatif adalah metode untuk dapat mengeksplorasi serta memahami makna masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam proses penelitian kualitatif cenderung melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, mengajukan pertanyaan dan prosedur, menganalisis data secara induktif mulai tema khusus ke umum dan menafsirkan makna data”. Desain penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini menggunakan desain deskriptif, Menurut Sudjana (2010) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang”. Ciri-ciri dari metode deskriptif seperti yang dikemukakan oleh Nasution (2003) yaitu : (1) Memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang atau masalah-masalah yang aktual. (2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa, oleh karena itu metode ini sering disebut metode analisa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi yang berlaku saat ini menjadi pondasi utama dalam pelaksanaan program pembentukan komponen cadangan di Indonesia. Regulasi-regulasi ini mengatur berbagai aspek, mulai dari proses perekrutan, pengembangan keterampilan, hingga penugasan operasional komponen cadangan. Namun, efektivitas regulasi dalam meningkatkan kualitas dan kesiapan komponen cadangan masih menjadi isu utama. Implementasi regulasi yang belum optimal seringkali mengakibatkan kendala dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM), yang merupakan faktor penting dalam mendukung pertahanan nasional. Salah satu kendala utama adalah koordinasi antar kementerian terkait yang belum maksimal, seperti antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta lembaga-lembaga seperti TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. Kurangnya sinergi ini seringkali menyebabkan tumpang tindih fungsi dan tugas, serta menurunkan efektivitas pengelolaan SDM. Di samping itu, regulasi yang mengatur alokasi anggaran dan pembiayaan juga perlu diperhatikan. Regulasi yang mempertimbangkan ketersediaan SDM berkualitas dan berkomitmen tinggi juga sangat penting. Penyelarasan regulasi dengan kebutuhan nyata di lapangan dapat mengoptimalkan hasil program ini. Proses rekrutmen yang transparan dan selektif, serta pengawasan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program menjadi langkah penting untuk memastikan regulasi diterapkan dengan baik dan menghasilkan dampak positif yang diharapkan.

Dalam pelaksanaan program pembentukan komponen cadangan, berbagai hambatan dan tantangan muncul terkait dengan regulasi. Salah satu hambatan utama adalah koordinasi yang kurang optimal antara lembaga-lembaga terkait. Hal ini mengakibatkan efisiensi penggunaan SDM, anggaran, dan infrastruktur yang tersedia menjadi tidak maksimal. Selain itu, alokasi anggaran yang tidak proporsional dengan kebutuhan juga menjadi kendala. Ketersediaan SDM yang berkualitas dan kompeten juga merupakan tantangan signifikan. Proses rekrutmen dan seleksi yang masih memerlukan perbaikan dapat menghambat kesiapan operasional komponen cadangan. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembentukan komponen cadangan juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan program ini. Regulasi yang mengatur sosialisasi dan edukasi masih perlu ditingkatkan untuk memastikan masyarakat memahami peran mereka dalam mendukung pertahanan nasional.

Makmur Supriyatno dalam bukunya "Tentang Ilmu Pertahanan" menjelaskan bahwa pertahanan sebagai ilmu dan seni mempelajari sumber daya nasional yang dijadikan kekuatan nasional dalam berbagai kondisi. Pertahanan negara terbentuk sesuai dengan arah dan kebijakan suatu negara dalam menetapkan postur pertahanannya. Dalam konteks pembentukan komponen cadangan, regulasi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan zaman serta prinsip-prinsip *good governance* dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan komponen cadangan yang tangguh dan andal. Mengacu pada teori Hanneg dari Makmur Supriyatno, maka pentingnya regulasi yang efektif dalam membentuk komponen cadangan menjadi semakin jelas. Regulasi harus mampu mengoptimalkan sumber daya nasional untuk menghadapi ancaman, baik militer maupun non-militer, guna menjaga keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan bangsa dalam rangka mewujudkan keamanan nasional. Oleh karena itu, reformasi regulasi yang mengakomodasi dinamika modern dan tantangan strategis menjadi bagian integral dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembentukan komponen cadangan di Indonesia.



Dalam pengaplikasian regulasi yang tersedia, maka pentingnya menanamkan pemahaman kepada masyarakat terkait regulasi-regulasi yang telah dibentuk. Aspek sosialisasi mempunyai peran penting dalam memberikan pemahaman serta kesadaran masyarakat akan pentingnya Komponen Cadangan serta dapat menjawab berbagai polemik yang terjadi di Masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembentukan komponen cadangan dalam mendukung pertahanan nasional, diperlukan sejumlah upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui sosialisasi dan edukasi yang intensif tentang peran serta masyarakat dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Program-program sosialisasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti kampanye di media massa, penggunaan media sosial, pembuatan materi edukasi seperti brosur, video pendek, dan infografis yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Selain itu, kerjasama yang erat antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta juga menjadi kunci dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pembentukan komponen cadangan. Keterlibatan berbagai pihak ini dapat memperluas jangkauan dan efektivitas program sosialisasi, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan urgensi dari pembentukan komponen cadangan dalam mendukung pertahanan nasional. Pendekatan yang partisipatif dan inklusif juga perlu diterapkan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini mencakup melibatkan berbagai kelompok dan komunitas dalam diskusi, seminar, dan forum yang membahas secara terbuka tentang pentingnya peran masyarakat dalam pertahanan nasional. Melalui dialog yang konstruktif dan interaktif, kesadaran masyarakat dapat ditingkatkan dan motivasi untuk berpartisipasi dalam program pembentukan komponen cadangan dapat lebih terjaga.

Pemanfaatan teknologi informasi juga dapat menjadi sarana efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Pembuatan aplikasi mobile atau website yang menyediakan informasi lengkap tentang program pembentukan komponen cadangan, materi edukasi, berita terkini, dan forum diskusi dapat membantu mengedukasi masyarakat secara lebih luas dan mudah diakses. Penggunaan media digital juga dapat memungkinkan interaksi yang lebih aktif antara masyarakat dengan pihak-pihak terkait, seperti TNI dan pemerintah daerah.

Namun aspek yang paling penting adalah upaya sosialisasi langsung kepada masyarakat umum, pendekatan melalui pendidikan formal dan informal juga memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pembentukan komponen cadangan. Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan tentang pertahanan nasional di berbagai tingkatan, mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi, dapat membantu menciptakan kesadaran dan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran masyarakat dalam menjaga keamanan negara. Kerjasama antara lembaga pendidikan, TNI, dan instansi terkait lainnya dalam mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan materi tentang pertahanan nasional dan pembentukan komponen cadangan juga dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Materi-materi ini dapat disesuaikan dengan tingkat usia dan pemahaman masyarakat sehingga lebih mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan. Sinkronisasi antar Kementerian atau lembaga non-Kementerian dalam Penyelenggaraan Program Bela Negara merupakan sebuah tantangan yang kompleks namun penting dalam mendukung sistem Pertahanan Negara. George R. Terry, seorang ahli manajemen, menjelaskan bahwa Manajemen adalah proses khas yang terdiri dari tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan (POAC) yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya

manusia dan sumber-sumber lain. Mengacu kepada teori tersebut, maka aspek-aspek penting dalam manajemen menurut terry diaplikasikan pada sinkronisasi antar Kementerian atau Lembaga non-Kementerian dalam Penyelenggaraan Program Bela Negara dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. **Perencanaan.** Upaya sinkronisasi perlu direncanakan dengan baik, diantaranya untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar instansi dalam Program Bela Negara. Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan regulasi antar Kementerian atau lembaga non-Kementerian juga menjadi kendala dalam konteks ini. Maka perencanaan diperlukan untuk menghilangkan perbedaan pandangan antar instansi dalam prosedur pelaksanaan program, alokasi anggaran, serta kriteria evaluasi dan monitoring. Diperlukan langkah-langkah untuk menyelaraskan kebijakan dan regulasi antar lembaga guna mencapai keselarasan dan konsistensi dalam penyelenggaraan Program Bela Negara.
- b. **Pengorganisasian.** Dalam upaya mencapai sinkronisasi antar Kementerian atau lembaga non-Kementerian dalam penyelenggaraan Program Bela Negara, terdapat sejumlah kendala utama yang perlu diatasi. Salah satunya adalah kurangnya koordinasi dan komunikasi yang efektif antara berbagai pihak terkait, sesuai dengan konsep SInkronisasi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan visi, misi, dan kepentingan antar lembaga, yang dapat mengakibatkan tumpang tindihnya program-program, penggunaan sumber daya yang tidak efisien, serta kurangnya sinergi dalam mencapai tujuan Program Bela Negara. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk memperkuat mekanisme koordinasi dan komunikasi antar lembaga.
- c. **Pelaksanaan.** Dalam unsur pelaksanaan, maka ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur yang belum memadai selama ini menjadi kendala, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas SDM yang terlatih dalam bidang koordinasi antar lembaga serta infrastruktur yang mendukung pertukaran informasi dan data. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari proses sinkronisasi antar Kementerian atau lembaga non-Kementerian. Faktor eksternal juga perlu diperhatikan, perbedaan persepsi dan dukungan dari pihak eksternal seperti masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat dapat mengganggu proses sinkronisasi dan implementasi Program Bela Negara. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik yang efektif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap Program Bela Negara.
- d. **Pengawasan.** Dihadapkan pada aspek pengawasan maka efektivitas koordinasi antarinstansi dalam memastikan keselarasan dan keserasian program-program Bela Negara juga dapat ditingkatkan melalui penerapan konsep-konsep manajemen. Pembentukan forum koordinasi lintas sektor, peningkatan komunikasi dan koordinasi secara berkala antara pimpinan atau perwakilan Kementerian dan lembaga non-Kementerian, penyusunan panduan teknis yang jelas, melibatkan pemangku kepentingan eksternal. Oleh karena itu integrasi antara konsep-konsep manajemen dengan upaya meningkatkan sinergi antar Kementerian dan lembaga non-Kementerian dalam Program Bela Negara akan memberikan landasan yang kokoh dalam membangun paradigma manajemen yang baik untuk mendukung sistem Pertahanan Negara. Melalui koordinasi yang efektif, penyelarasan kebijakan, penggunaan sumber daya yang efisien, dan

dukungan dari berbagai pihak terkait, Program Bela Negara dapat berjalan dengan lebih terkoordinasi, efisien, dan efektif dalam memenuhi tujuan strategisnya.

Dalam memastikan keselarasan dan keserasian program-program Bela Negara yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga di Indonesia menjadi sebuah tantangan yang kompleks namun penting. Salah satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa Program Bela Negara tidak hanya sekadar kegiatan rutin, melainkan sebuah upaya strategis untuk membangun kesadaran, semangat patriotisme, dan kesiapan dalam menghadapi ancaman terhadap negara. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif antarinstansi menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa semua program yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan tujuan-tujuan strategis Program Bela Negara. Salah satu aspek penting dalam koordinasi antarinstansi adalah penyelarasan visi, misi, dan tujuan antar lembaga yang terlibat dalam Program Bela Negara. Hal ini mencakup pemahaman yang sama terhadap pentingnya pembentukan kesadaran nasional, pemeliharaan kedaulatan negara, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman, serta penguatan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Tanpa keselarasan dalam visi dan tujuan ini, risiko terjadinya tumpang tindih program dan pemborosan sumber daya akan meningkat, mengurangi efektivitas keseluruhan Program Bela Negara.

Koordinasi antarinstansi juga membutuhkan mekanisme yang jelas dan efisien dalam pertukaran informasi, data, dan pengalaman antar lembaga. Pembentukan tim atau forum koordinasi yang terdiri dari perwakilan dari berbagai lembaga terkait dapat menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas koordinasi ini. Forum ini dapat digunakan untuk berdiskusi, berbagi informasi terkini, menyusun rencana aksi bersama, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-program Bela Negara. Selain mekanisme formal, penting juga untuk memperhatikan aspek budaya organisasi dan komunikasi antar lembaga. Budaya kerja yang terbuka, saling mendukung, dan kolaboratif akan memperkuat efektivitas koordinasi antarinstansi. Komunikasi yang lancar, transparan, dan terbuka juga menjadi kunci dalam memastikan bahwa semua pihak terinformasi secara lengkap dan tepat waktu mengenai berbagai kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dengan Program Bela Negara.

Strategi dan upaya dalam meningkatkan efektivitas pembentukan Komponen Cadangan merupakan suatu proses yang memerlukan pemikiran mendalam dan implementasi yang terstruktur. Hal ini sejalan dengan teori strategi Arthur F. Lykke, Jr. (1993), yang mengembangkan konsep kerangka strategi yang meliputi *Ends* (tujuan), *Ways* (cara), dan *Means* (sumber daya). Dalam konteks pembentukan komponen cadangan, *ends* mengacu pada tujuan akhir dari strategi tersebut, yaitu memiliki komponen cadangan yang tangguh, siap menghadapi berbagai tantangan, dan dapat berkontribusi secara efektif terhadap keamanan nasional. *Ways* mencakup strategi dan upaya yang dilakukan, seperti koordinasi antar instansi, sinergi dengan stakeholder, implementasi SOP/Protap, rekrutmen SDM berkualitas, dan penggunaan teknologi informasi. Sementara itu, *means* mencakup sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan strategi tersebut, seperti anggaran yang memadai, fasilitas pelatihan, teknologi informasi, dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Untuk menjalankan strategi guna meningkatkan efektivitas pembentukan Komponen Cadangan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Antar Instansi dan Sinergi *Stakeholder*, Strategi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan komponen cadangan adalah melalui cara

(*Means*) koordinasi, kerjasama dan integrasi antar instansi pemerintah yang sinergis dengan berbagai stakeholder. Koordinasi antar instansi pemerintah menjadi kunci penting dalam pembentukan komponen cadangan. Misalnya, Kementerian Pertahanan, sebagai pemegang kendali utama, harus bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan tujuan (*Ends*) mewujudkan integrasi yang optimal dalam pembentukan komponen cadangan. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan sarana (*Ways*) membentuk badan koordinasi khusus di bawah Kementerian Pertahanan melalui sistem komunikasi terpadu dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi miskomunikasi. Badan ini harus memiliki wewenang untuk mengatur, memantau, dan mengevaluasi kinerja setiap instansi dalam menjalankan tugasnya terkait komponen cadangan.

Kementerian Pertahanan sebagai pemegang kendali utama harus melakukan berbagai cara (*Means*) diantaranya yaitu berkolaborasi dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait, seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Setiap instansi memiliki peran spesifik yang harus diintegrasikan dalam kerangka besar pembentukan komponen cadangan. Misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berperan dalam sosialisasi dan pendidikan mengenai pentingnya komponen cadangan di kalangan siswa dan mahasiswa. Sementara itu, BNPB dapat memberikan pelatihan dan simulasi penanganan bencana yang merupakan salah satu fungsi vital dari komponen cadangan. Koordinasi ini membutuhkan cara (*Means*) dan mekanisme yang jelas dan efisien. Pembentukan sebuah badan koordinasi khusus di bawah Kementerian Pertahanan dapat menjadi solusi untuk memastikan semua instansi terkait dapat beroperasi dengan selaras. Badan ini harus memiliki wewenang untuk mengatur, memantau, dan mengevaluasi kinerja setiap instansi dalam menjalankan tugasnya terkait komponen cadangan. Selain itu, perlu juga dibuat sebuah sistem komunikasi terpadu yang memungkinkan pertukaran informasi secara real-time antara instansi. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga mengurangi potensi miskomunikasi yang dapat menghambat implementasi program. Selain koordinasi antar instansi pemerintah, sinergi dengan berbagai stakeholder lainnya juga merupakan faktor penentu keberhasilan pembentukan komponen cadangan. Stakeholder utama dalam konteks ini meliputi masyarakat sipil, akademisi, sektor swasta, serta organisasi non-pemerintah. Masing-masing stakeholder memiliki kontribusi atau cara (*Means*) yang unik yang dapat memperkaya dan memperkuat program komponen cadangan.

- b. Pembangunan Kuantitas dan Kualitas SDM dalam pelaksanaan program Bela Negara. Salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam menentukan efektivitas pembentukan komponen cadangan adalah kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam program Bela Negara. Kuantitas mengacu pada jumlah individu yang direkrut dan dilibatkan dalam komponen cadangan, sementara kualitas mengacu pada kompetensi, kemampuan, dan kesiapan mereka dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban. Untuk meningkatkan kuantitas SDM dalam komponen cadangan, perlu adanya strategi rekrutmen yang efektif dan masif. Pemerintah harus melakukan kampanye rekrutmen (*Means*) yang luas dan terencana dengan baik, yang mencakup semua lapisan masyarakat. Kampanye ini harus mengedepankan nilai-nilai nasionalisme dan pentingnya kontribusi individu terhadap keamanan nasional. Salah satu pendekatan yang

dapat digunakan adalah melalui sarana (Ways) media massa, media sosial, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Mengadakan seminar, workshop, dan roadshow di berbagai daerah juga dapat membantu meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat.

Selain itu, fasilitas tunjangan yang menarik juga dapat meningkatkan jumlah peserta program Bela Negara, tunjangan ini bisa berupa bantuan pendidikan, jaminan pekerjaan setelah menyelesaikan program, tunjangan kesejahteraan, dan fasilitas kesehatan. Pemerintah juga dapat menawarkan pengakuan resmi seperti sertifikat yang dapat meningkatkan profil karir individu di masa depan. Dengan memberikan tunjangan yang konkret, lebih banyak individu akan terdorong untuk bergabung dan berpartisipasi dalam komponen cadangan. Tidak kalah pentingnya adalah penyediaan fasilitas pelatihan yang memadai dan mudah diakses. Pemerintah perlu membangun dan mengoptimalkan pusat-pusat pelatihan di berbagai daerah untuk memastikan bahwa pelatihan dapat diikuti oleh masyarakat dari seluruh pelosok negeri. Pusat pelatihan ini harus dilengkapi dengan peralatan yang memadai dan instruktur yang kompeten memastikan pelatihan berjalan efektif.

- Materi pelatihan harus dirancang secara holistik, mencakup aspek fisik, mental, dan keterampilan teknis. Pelatihan fisik meliputi kemampuan dasar militer seperti baris-berbaris, penggunaan senjata, dan teknik bertahan hidup. Aspek mental meliputi penguatan karakter, disiplin, dan ketahanan psikologis. Sementara keterampilan teknis meliputi pengetahuan tentang teknologi militer, komunikasi, dan medis. Pelatihan ini harus dilakukan secara berkesinambungan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan situasi geopolitik yang ada.
 - Kualitas instruktur (**Ways**) juga merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas SDM. Pemerintah harus memastikan bahwa instruktur yang dilibatkan dalam program Bela Negara memiliki kompetensi yang tinggi dan pengalaman yang memadai. Instruktur harus mampu menyampaikan materi pelatihan dengan efektif dan memotivasi peserta untuk berprestasi. Oleh karena itu, program pelatihan bagi instruktur juga harus diadakan secara rutin untuk memastikan bahwa mereka selalu up-to-date dengan metode dan teknologi terbaru.
 - Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (**Ways**) dalam proses pelatihan juga dapat meningkatkan kualitas SDM. Penggunaan simulasi komputer, *e-learning*, dan aplikasi mobile untuk pelatihan dapat membantu peserta mempelajari materi dengan lebih interaktif dan menarik. Teknologi ini juga memungkinkan pelatihan dilakukan secara jarak jauh, sehingga peserta dari daerah terpencil pun dapat mengikuti pelatihan tanpa harus bepergian jauh.
 - Evaluasi dan pengawasan berkala terhadap peserta program juga sangat penting untuk memastikan bahwa mereka mencapai standar kualitas yang diinginkan. Pemerintah perlu membentuk tim evaluasi yang independen untuk menilai kinerja peserta secara objektif. Hasil evaluasi ini kemudian harus digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan pengembangan program pelatihan ke depannya.
- c. Pembentukan Protap/SOP pola komunikasi dan koordinasi. Implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Protap yang jelas dan terstruktur juga menjadi pondasi penting dalam pembentukan komponen cadangan. SOP/Protap harus dirancang dengan jelas dan rinci, mencakup seluruh aspek pembentukan komponen cadangan mulai dari

rekrutmen, pelatihan, pengelolaan, hingga evaluasi kinerja. Penerapan SOP/Protap yang konsisten dan terintegrasi akan memastikan bahwa setiap langkah dalam pembentukan komponen cadangan dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selain itu, penggunaan (*Means*) teknologi informasi juga dapat meningkatkan efektivitas pembentukan komponen cadangan. Misalnya, penggunaan sistem informasi manajemen yang terintegrasi dapat mempermudah pengelolaan data peserta pelatihan yang telah dilaksanakan, serta evaluasi kinerja secara real-time. Penggunaan teknologi digital seperti *e-learning platform* juga dapat memperluas akses pelatihan dan memungkinkan peserta untuk belajar secara mandiri sesuai dengan jadwal yang fleksibel. Dalam konteks pembentukan komponen cadangan, penting untuk memperhatikan aspek psikologis dan motivasi peserta. Program pelatihan yang dirancang dengan baik harus mampu membangun semangat nasionalisme, rasa kebanggaan, dan keterlibatan aktif peserta dalam menjalankan tugas-tugas bela negara. Inovasi dalam penyusunan materi pelatihan yang menarik, simulasi realistis, serta penggunaan metode pembelajaran aktif dan interaktif dapat meningkatkan minat dan motivasi peserta.

SOP/Protap berfungsi sebagai panduan yang sistematis dan terstandarisasi untuk memastikan bahwa semua proses dalam pembentukan dan operasional komponen cadangan dilakukan dengan konsisten dan efisien. Untuk meningkatkan efektivitas pembentukan komponen cadangan, pengembangan dan implementasi SOP/Protap yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan dengan tujuan (*Ends*) sebagai berikut:

- SOP/Protap harus dirancang dengan jelas dan rinci, mencakup seluruh aspek pembentukan komponen cadangan mulai dari rekrutmen, pelatihan, penugasan, hingga evaluasi. Setiap langkah dalam proses ini harus dijelaskan secara detail untuk menghindari interpretasi yang salah dan memastikan keseragaman dalam pelaksanaan di berbagai daerah. Penyusunan SOP/Protap ini harus melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, TNI, serta instansi lainnya yang terkait, untuk memastikan bahwa semua aspek teknis dan operasional tercakup.
- 2) SOP/Protap harus diuji dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui simulasi dan latihan berkala yang melibatkan seluruh komponen cadangan. Hasil evaluasi harus digunakan untuk memperbarui dan memperbaiki SOP/Protap, sehingga selalu relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang berkembang.
- Sosialisasi SOP/Protap kepada seluruh anggota komponen cadangan adalah langkah yang krusial. Setiap anggota harus memahami dan mampu menerapkan SOP/Protap dengan baik. Pelatihan khusus mengenai SOP/Protap harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan dasar komponen cadangan. Selain itu, dokumen SOP/Protap harus mudah diakses oleh seluruh anggota untuk referensi kapanpun diperlukan.

Koordinasi yang efektif antar instansi dan unit yang terlibat dalam pembentukan komponen cadangan adalah kunci sukses. Pola koordinasi yang baik memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat bekerja secara harmonis dan efisien. Untuk mencapai hal ini, beberapa strategi perlu diterapkan melalui cara (*Ways*) sebagai berikut :

- Pembentukan tim koordinasi lintas instansi yang bertugas mengawasi dan mengatur pelaksanaan program komponen cadangan. Tim ini harus terdiri dari perwakilan dari

berbagai instansi terkait, termasuk Kementerian Pertahanan, TNI, Polri, BNPB, dan lembaga lainnya. Tim ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kebijakan, anggaran, serta kegiatan operasional dan pelatihan komponen cadangan. Pertemuan rutin harus diadakan untuk membahas perkembangan, tantangan, dan solusi program.

- Penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi juga sangat penting. Sistem informasi yang terintegrasi dapat memfasilitasi pertukaran data dan informasi secara cepat dan akurat antara instansi. Misalnya, penggunaan platform manajemen proyek atau aplikasi khusus untuk pelaporan dan monitoring dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam koordinasi. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat mempermudah pelacakan dan evaluasi kinerja komponen cadangan.
- Mekanisme koordinasi harus fleksibel dan adaptif terhadap perubahan situasi. Pola koordinasi yang rigid dan birokratis seringkali menghambat respon cepat terhadap situasi darurat. Oleh karena itu, perlu ada prosedur yang memungkinkan perubahan cepat dalam pola koordinasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lapangan. Ini termasuk pemberian wewenang kepada tim koordinasi untuk mengambil keputusan strategis dalam situasi darurat tanpa harus menunggu persetujuan dari tingkat yang lebih tinggi.

Komunikasi yang efektif merupakan elemen vital dalam pembentukan dan operasional komponen cadangan. Pola komunikasi yang baik memastikan bahwa informasi penting dapat disampaikan dengan cepat dan akurat, dengan tujuan **(Ends)** agar meminimalisir kesalahpahaman dan miskomunikasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Saluran komunikasi yang jelas dan terstruktur harus dibentuk antara berbagai level komando dalam komponen cadangan. Setiap anggota harus tahu kepada siapa mereka harus melapor dan dari siapa mereka menerima instruksi. Saluran komunikasi ini harus mencakup komunikasi vertikal (antara level komando dan anggota) dan komunikasi horizontal (antara unit-unit yang setara). Struktur komunikasi yang jelas ini akan memastikan bahwa informasi dapat mengalir dengan lancar dan efisien di seluruh organisasi.
- Penggunaan teknologi komunikasi modern sangat penting dalam mendukung pola komunikasi yang efektif. Penggunaan radio komunikasi, aplikasi pesan instan, dan platform komunikasi digital lainnya dapat mempercepat pertukaran informasi dan instruksi. Selain itu, sistem komunikasi darurat harus selalu siap digunakan dalam situasi krisis untuk memastikan bahwa komunikasi tetap terjaga meskipun infrastruktur komunikasi utama terganggu.
- 3) Latihan dan simulasi komunikasi harus dilakukan secara berkala. Latihan ini bertujuan untuk menguji efektivitas pola komunikasi yang telah ditetapkan dan memastikan bahwa semua anggota komponen cadangan dapat berkomunikasi dengan baik dalam situasi darurat. Latihan ini juga dapat membantu mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan dalam sistem komunikasi sebelum menghadapi situasi nyata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Komponen cadangan adalah bagian integral dari sistem pertahanan negara yang terdiri dari warga negara yang disiapkan untuk memperkuat dan mendukung kekuatan utama militer saat keadaan darurat atau perang. Konsep komponen cadangan telah diatur dalam Undang-



Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pembentukan komponen cadangan bertujuan untuk meningkatkan kesiapan pertahanan negara dengan melibatkan lebih banyak warga sipil dalam upaya pertahanan. Komponen cadangan memiliki beberapa peran penting dalam sistem pertahanan negara. Diantaranya berfungsi sebagai kekuatan tambahan yang dapat dimobilisasi dengan cepat saat terjadi ancaman terhadap kedaulatan negara. Hal ini sangat penting mengingat bahwa ancaman terhadap negara bisa datang kapan saja dan dari mana saja, baik dalam bentuk konflik bersenjata, terorisme, maupun bencana alam. Dengan adanya komponen cadangan, negara memiliki cadangan tenaga yang siap digunakan kapan saja dalam situasi darurat, sehingga meningkatkan kesiapan dan responsivitas pertahanan negara.

Kondisi regulasi yang tersedia saat ini dalam pembentukan komponen cadangan masih belum lengkap sehingga dalam pelaksanaan dilapangan masih menemui kendala, beberapa Kendala yang muncul adalah terkait dengan pembinaan Komcad saat ini masih menjadi tanggung jawab dari Kemhan sehingga satuan TNI diwilayah belum ada dasar dalam membantu untuk pembinaan Komponen Cadangan. Kemudian kendala selanjutnya adalah terkait dengan kepangkatan Komcad, pemberhentian Komcad baik secara hormat maupun tidak hormat, tata cara dan besaran tunjangan operasi Komcad saat dimobilisasi sampai dengan saat ini belum ada aturan yang mengatur sehingga akan menjadi kendala saat ini maupun kedepan jika betul-betul Komcad menjalani mobilisasi. Terkait dengan pembiayaan dan alokasi anggaran yang tidak proporsional dengan kebutuhan sebenarnya dalam pembentukan komponen cadangan. Regulasi terkait alokasi anggaran untuk pelatihan, latihan, pengadaan peralatan, serta infrastruktur pendukung seringkali tidak memadai, mengakibatkan terhambatnya pengembangan dan penguatan kapabilitas komponen cadangan. Kurangnya anggaran juga dapat memengaruhi ketersediaan fasilitas yang memadai untuk pelatihan dan latihan, serta pengadaan peralatan modern yang diperlukan untuk mendukung operasional komponen cadangan secara efektif.

Penyelarasan antara regulasi-regulasi yang tersedia dengan kebutuhan nyata di lapangan menjadi hal yang mendesak untuk diperhatikan guna mengoptimalkan hasil dari program tersebut. Hal ini mencakup aspek rekrutmen yang transparan, selektif, dan berorientasi pada kemampuan serta kebutuhan strategis dalam mendukung operasional pertahanan nasional. Terkait dengan implementasi regulasi, pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program pembentukan komponen cadangan juga sangat penting. Regulasi yang hanya ada pada tingkat perundang-undangan tanpa diikuti dengan pengawasan yang ketat dapat mengakibatkan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian antara kebijakan yang diatur dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam konteks yang lebih luas, pentingnya reformasi regulasi yang mengakomodasi dinamika dan tantangan zaman modern juga menjadi bagian integral dari upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembentukan komponen cadangan. Regulasi yang adaptif, responsif terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan strategis, serta mengedepankan prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan komponen cadangan.

Kendala dalam mencapai sinkronisasi antar Kementerian atau lembaga non-Kementerian dalam Program Bela Negara, faktor ini mencakup perbedaan dalam persepsi dan dukungan dari pihak-pihak eksternal seperti masyarakat, media, dan lembaga swadaya masyarakat terhadap program-program yang dilaksanakan. Perbedaan pendapat dan ekspektasi dari pihak eksternal ini dapat mengganggu proses sinkronisasi dan implementasi Program Bela



Negara secara menyeluruh. Kendala lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Program Bela Negara. Kurangnya pemahaman ini dapat mengakibatkan rendahnya partisipasi dan dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan program-program yang ada. Upaya sosialisasi, edukasi, dan pembinaan kesadaran nasional perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami peran serta mereka dalam mendukung Program Bela Negara dan menjaga keamanan serta kedaulatan negara.

Dalam konteks efektivitas koordinasi antar instansi, perlu memperhatikan peran koordinator atau pimpinan koordinasi yang memiliki wewenang dan kapasitas dalam mengarahkan dan memfasilitasi proses koordinasi ini, Kementerian Pertahanan sebagai lembaga terdepan yang ditunjuk Pemerintah perlu melaksanakan koordinasi terkait pemilikan pemahaman yang mendalam mengenai Program Bela Negara, memiliki jaringan yang luas di antara berbagai lembaga terkait, dan mampu memimpin dengan visi strategis akan sangat mendukung tercapainya efektivitas dalam koordinasi antarinstansi. Selain faktor internal, faktor eksternal juga perlu diperhatikan dalam meningkatkan efektivitas koordinasi antarinstansi dalam Program Bela Negara. Keterlibatan masyarakat, media, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta dalam mendukung dan memahami pentingnya Program Bela Negara akan menjadi pendorong utama dalam kesuksesan program ini. Masyarakat yang mendukung, terlibat aktif dan memiliki pemahaman yang baik tentang Program Bela Negara akan memperkuat sinergi antara lembaga-lembaga terkait dalam mencapai tujuan-tujuan strategis Program Bela Negara.

Efektivitas pelaksanaan program Bela Negara saat ini masih jauh dari harapan, terutama dalam hal rekrutmen sesuai target renstra Kemenhan yang menetapkan perekrutan sebanyak 25.000 personel setiap tahunnya namun sampai hari ini baru dapat mencapai 10% dari target yang ditetapkan tersebut. Kemudian dalam aspek kualitas, belum dapat diidentifikasi efektivitas program ini dikarenakan belum adanya regulasi yang mengatur mobilisasi khususnya dalam penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang dalam mengatasi ancaman non-militer. Maka daripada itu, pentingnya strategi dan upaya dalam meningkatkan efektivitas pembentukan Komcad sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan Pemerintah pada program ini. Untuk meningkatkan efektivitas Pembentukan Komponen Cadangan, maka diperlukan strategi dan upaya agar diperoleh suatu hasil Pembentukan sesuai target Pemerintah, beberapa strategi dan upaya yang perlu diterapkan adalah sebagai berikut :

- a. Koordinasi Antar Instansi dan Sinergi *Stakeholder*. Strategi utama yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pembentukan komponen cadangan adalah melalui koordinasi antar instansi pemerintah dan sinergi dengan berbagai stakeholder. Koordinasi antar instansi pemerintah menjadi kunci penting dalam pembentukan komponen cadangan.
- b. Pembangunan Kuantitas dan Kualitas SDM dalam pelaksanaan program Bela Negara. Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam komponen cadangan, perlu adanya strategi rekrutmen yang efektif dan masif. Pemerintah harus melakukan kampanye rekrutmen yang luas dan terencana dengan baik, yang mencakup semua lapisan masyarakat. Kampanye ini harus mengedepankan nilai-nilai nasionalisme dan pentingnya kontribusi individu terhadap keamanan nasional. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah melalui media massa, media sosial, dan kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti sekolah dan universitas. Mengadakan seminar, workshop,



- dan roadshow di berbagai daerah juga dapat membantu meningkatkan minat dan partisipasi masyarakat.
- c. Pembentukan SOP/Protap, Pola Koordinasi dan Komunikasi. SOP/Protap harus dirancang dengan jelas dan rinci, mencakup seluruh aspek pembentukan komponen cadangan mulai dari rekrutmen, pelatihan, pengelolaan, hingga evaluasi kinerja. Penerapan SOP/Protap yang konsisten dan terintegrasi akan memastikan bahwa setiap langkah dalam pembentukan komponen cadangan dilakukan dengan efisien dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Arthur Lykke. (1993) .“*Military Strategy: Theory and Aplication*” (Pennsylvania: US Army War College.
- Creswell, J. W. (2010). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan Mixed*. (Pustaka Belajar.
- David, Fred. R.(2004).” *Manajemen Strategis:Konsep-Konsep*.”. Jakarta: PT.Indeks.
- Fred R. David, (2011).“*Manajemen Strategis Konsep*”, (Jakarta: Salemba empat.
- George R. Terry. (1956) *Principles of Management*. Publish Richard D. Irwin from The University of California.
- Ismail Solihin. (2012). *Pengantar Manajemen* . Erlangga, Jakarta.
- Kemenhan RI. (2015). “*Buku Putih Pertahanan Indonesia*” Jakarta : Kemenhan RI. hlm. 22-23
- Nasution, S. (2003). *Metode Penelitian: Naturalistik Kualitatif. In Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Bandung : Tarsito, 2003), hlm 61
- Purwanto, S., Supangat, S., Esterina, M., Souhoka, S., Chandra, F., & Hariputra, A. & Arianto, T.(2024). *Manajemen Sumber Daya Manusia. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah*.
- Supriyanto, Makmur. (2014) “*Tentang Ilmu Pertahanan*” (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Sugiyono. (2020) *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sigit Purwanto, S. I. P. (2024). Definisi Dan Konsep. *Manajemen Sumber Daya Manusia, 1*.



Sudjana, D. (Djudju). (2010) *Metode dan Teknik Pembelajaran Partisipatif (4th ed.)*. (Falah Production.

2. Jurnal

Purwanto, S., Hidayatullah, S. S. W., & Tirtoadisuryo, D. *HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT STRATEGIES FOR ENHANCING ORGANIZATIONAL PERFORMANCE IN THE DIGITAL ERA*.

Purwanto, S., Purnomo, M. R., & Budiman, H. (2025). *POWER DYNAMICS IN DECISION MAKING: A QUALITATIVE ANALYSIS*. *POWER*, 2(1), 80-86.

Yudi Rusfiana. *Aktualisasi Sistem Pertahanan Rakyat Semesta (Sishanta) Dan Dinamika Potensi Ancaman*. Jurnal Moderat Vol. 7, No. 3. 2021: Jakarta.